



Vol. 8, No. 2,
September 2018

ISSN 2252-5491

Forum Agribisnis

Agribusiness Forum

Analisis Kelayakan Investasi Kapal Khusus Angkutan Ternak di Indonesia Skenario Rute Celukan Bawang-Tanjung Priok-Cirebon
Titik Triary Wijaksana, Rita Nurmalina, dan Burhanuddin

Analisis Daya saing Jagung di Wilayah Sentra Produksi di Indonesia dengan Pendekatan *Policy Analysis Matrix* (PAM)
Ni Wayan Surya Darmayanti, Ratna Winandi, dan Netti Tinaprilla

Analisis Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pengrajin Gula Aren di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Novia Fitri Yanti Saragih, Suharno, dan Harianto

Analisis Alternatif Strategi Pengembangan Koperasi Produksi Susu
M Dahri Zikri P, Ono Suparno, dan Tajuddin Bantacu

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Produksi Usahatani Jagung serta Efisiensi Teknis di Kabupaten Kupang
Jullyo Gideon Rohi, Ratna Winandi, dan Anna Fariyanti

Faktor - Faktor yang Memengaruhi Harga Saham Perusahaan Perkebunan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2016
Ifan Rizky Kurniyanto, dan Bayu Krisnamurthi



DAFTAR ISI

Forum Agribisnis

Volume 8, No. 2 – September 2018

| | |
|---|-----------|
| Analisis Kelayakan Investasi Kapal Khusus Angkutan Ternak di Indonesia Skenario Rute Celukan Bawang-Tanjung Priok-Cirebon Titik Triary Wijaksana, Rita Nurmalina, dan Burhanuddin | 117 – 136 |
| Analisis Daya saing Jagung di Wilayah Sentra Produksi di Indonesia dengan Pendekatan <i>Policy Analysis Matrix</i> (PAM) Ni Wayan Surya Darmayanti, Ratna Winandi, dan Netti Tinaprilla | 137 – 154 |
| Analisis Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pengrajin Gula Aren di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Novia Fitri Yanti Saragih, Suharno, dan Harianto | 155 – 168 |
| Analisis Alternatif Strategi Pengembangan Koperasi Produksi Susu M Dahri Zikri P, Ono Suparno, dan Tajuddin Bantacu | 169 – 180 |
| Analisis Faktor yang Mempengaruhi Produksi Usahatani Jagung serta Efisiensi Teknis di Kabupaten Kupang Jullyo Gideon Rohi, Ratna Winandi, dan Anna Fariyanti | 181 – 198 |
| Faktor - Faktor yang Memengaruhi Harga Saham Perusahaan Perkebunan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2016 Ifan Rizky Kurniyanto, dan Bayu Krisnamurthi | 199 – 211 |

ANALISIS DAYASAING JAGUNG DI WILAYAH SENTRA PRODUKSI DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN *POLICY ANALYSIS MATRIX* (PAM)

Ni Wayan Surya Darmayanti^{*)}, Ratna Winandi^{)}, dan Netti Tinaprilla^{**)}**

^{*)} Program Magister Sains Agribisnis, Institut Pertanian Bogor

^{**)} Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB

email : niwayansuryad@gmail.com

ABSTRACT

The objectives of this research are to analyze competitiveness and the impact of government's policy of maize farming in several central productions in Indonesia. This research was conducted to analyze maize competitiveness using PAM (Policy Analysis Matrix) method. Data sample was conducted at four maize production centers, including East Java, Central Java, West Java, and South Sulawesi. The results show the forth centre have competitiveness. This showed by PCR values in some production areas less than 1 and for competitive advantage, indicated by DRCR values in production areas also less than 1. Analysis of the Government policy aspect, the government has been able to provide positive incentives for maize farming in North Jawa, Centre of Jawa and West Jawa. The impact of government policy on inputs and outputs simultaneously can provide a positive incentive to farmers at maize production sites in Jawa. But the government's policy hasn't been able to provide for output in Sulawesi Selatan. The conclusion is the fourth centres of maize production have competitive and comparative advantage. Sulawesi Selatan has high comparative advantages, so Sulawesi Selatan has high potential to improve maize farming.

Keywords : Maize, competitive advantages, comparative advantages, PAM, government's policy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing dan dampak kebijakan pemerintah pada beberapa wilayah sentra produksi jagung di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Policy Analysis Matrix (PAM). Pengambilan sampel data dilakukan pada empat wilayah sentra produksi, diantaranya : Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa keempat wilayah produksi memiliki daya saing. Hal ini yang ditunjukkan dengan keunggulan kompetitif, dimana nilai PCRnya yang kurang dari 1 dan untuk keunggulan komparatifnya, yang ditunjukkan dengan nilai DRCR yang kurang dari 1. Analisis yang dilakukan terkait dengan kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa, kebijakan pemerintah sudah memberikan insentif positif untuk usahatani jagung di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Namun, untuk wilayah Sulawesi Selatan kebijakan pemerintah terkait output belum memberikan insentif positif. Kesimpulannya keempat wilayah produksi memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif paling tinggi, sehingga Sulawesi Selatan memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan usahatani jagung.

Kata kunci : jagung, keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif, PAM, dan kebijakan pemerintah

PENDAHULUAN

Komoditas jagung merupakan salah satu komoditas pangan yang memiliki posisi yang strategis. Indonesia memiliki kontribusi yang relatif tinggi terhadap produksi jagung dunia, dimana Indonesia menempati posisi ke-8 di dunia dengan rata-rata produksi mencapai 18 576 000 ton pada periode 2010-2014 (Pusdatin, 2016). Kondisi tersebut menjadi potensi bagi Indonesia untuk berswasembada jagung. Hal tersebut didukung oleh kepemilikan luasan panen jagung yang cukup besar dan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, serta tingginya dukungan pemerintah untuk meningkatkan produksi jagung Indonesia. Dikaji dari sentra produksinya, Indonesia memiliki tujuh sentra utama produksi jagung nasional yang ada di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung dan Nusa Tenggara Barat.

Jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting, karena selama ini permintaan akan jagung di Indonesia tidak hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan untuk pangan, melainkan permintaan yang tinggi datang dari *non*-pakan. Dalam kurun waktu 2011 sampai 2015 permintaan dari industri pakan cenderung meningkat dari 3,67 juta ton pada tahun 2011 menjadi 3,88 juta ton karena kebutuhan jagung untuk pakan ternak semakin meningkat, yang seiring dengan semakin tingginya populasi ternak karena permintaan daging unggas yang meningkat (Pusdatin, 2016).

Dirjen Tanaman Pangan (2017) menyebutkan kebutuhan jagung tahun

2017, sebesar 1,7 persen untuk konsumsi rumah tangga, 73,3 persen untuk pakan, 0,5 persen untuk benih, dan 24,5 persen untuk industri

Berdasarkan data Pusdatin (2016) produksi jagung dari tahun 2010 hingga 2014 memiliki tren yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, namun disisi lain kebutuhan akan jagung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. *Nett* potensi produksi jagung di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 29 017 492 ton, namun secara aktual produksi jagung tahun 2017 sebesar 27 952 000 ton. Belum tercapainya target produksi nasional, menyebabkan Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan akan jagungnya, khususnya untuk industri pakan secara *independent*.

Berdasarkan data BPS 2018, total impor jagung Indonesia sepanjang tahun 2017 mencapai 3.468 ton. Sepanjang tahun 2011 hingga 2017 tren impor jagung sangat berfluktuatif, dengan jumlah impor tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan 2017 (BPS 2018). Volume total impor jagung pada periode 2011-2017 mencapai 17 882 ton, dengan rata-rata volume impor per tahunnya sebesar 2.555 ton (BPS 2018)

Tingginya impor jagung dikarenakan produksi jagung dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan jagung nasional secara kontinyu, hal tersebut dikarenakan panen jagung yang masih mengikuti musim (musiman) (Asmarantaka 2015). Permintaan jagung domestik yang belum mampu terpenuhi secara mandiri oleh produksi jagung domestik, mengindikasikan adanya peluang dan potensi yang sangat besar untuk pengembangan agribisnis jagung di Indonesia.

Kegiatan usahatani jagung yang efisien akan mampu meningkatkan produksi jagung nasional dan meningkatkan daya saing jagung di pasar dunia, oleh karena itu penelitian terkait daya saing jagung di Indonesia sangat relevan dilakukan, sehingga dapat memberikan gambaran terkait kemampuan daya saing jagung di Indonesia dan sebagai bahan acuan untuk evaluasi kegiatan usahatani jagung di Indonesia. Oleh karena itu hasil analisis dengan metode PAM ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan produktivitas usahatani jagung di Indonesia dan secara tidak langsung akan meningkatkan daya saing usahatani jagung di wilayah sentra produksi di Indonesia. Disamping itu adanya perhatian pemerintah yang sangat besar pada komoditas jagung, melalui program upstus pajale yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Maka dengan demikian penelitian daya saing jagung, dipandang perlu dilakukan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *Policy Analysis Matrix* (PAM).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Analisis kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *Policy Analysis Matrix* (PAM) (Tabel 1). Metode PAM digunakan untuk mengukur keunggulan kompetitif (PCR) dan keunggulan komparatif (DRCR) usahatani jagung, serta dianalisis juga kebijakan atau intervensi pemerintah terkait usahatani jagung pada keempat wilayah sentra produksi di Indonesia.

Warr (1994) dalam Kannapiran dan Fleming (1999) menyatakan adanya perbedaan antara keunggulan kompetitif dan komparatif, dimana keunggulan kompetitif merupakan parameter pengambilan keputusan untuk produksi dan perdagangan komoditas ekspor yang diukur dengan harga privat atau harga yang berlaku di pasar (harga aktual). Sedangkan keunggulan komparatif merupakan parameter pengambilan keputusan untuk produksi dan perdagangan komoditas ekspor yang diukur dengan harga sosial atau harga bayangan. Salvatore (2013) menyatakan suatu negara akan menjadi spesialisasi komoditas yang memiliki keunggulan secara komparatif di negaranya atau memiliki kerugian absolut terkecil, dan sebaliknya suatu negara akan melakukan impor untuk komoditas yang tidak memiliki keunggulan secara komparatif.

Hal pertama yang dilakukan untuk menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif, adalah penentuan *input* usahatani jagung. Tahapan selanjutnya adalah pengelompokan input tersebut kedalam komponen *input tradable* atau *non tradable*, kemudian menentukan harga bayangan *input* dan *output*. Input pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu *input tradable* dan *non – tradable*, *input tradable* merupakan *input – input* yang digunakan dalam usahatani, yang dapat diperjualbelikan di pasar internasional. Sedangkan *non- tradable* merupakan *input – input* dalam usahatani yang tidak diperdagangkan dalam perdagangan internasional, dimana input ini hanya diproduksi dan digunakan hanya di dalam negeri

Tabel 1 Policy Analysis Matrix (PAM)

| Uraian | Penerimaan | Biaya | | Keuntungan |
|-----------------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| | | Input <i>Tradable</i> | Input <i>Non-tradable</i> | |
| Harga Privat | A | B | C | D |
| Harga Sosial | E | F | G | H |
| Efek Divergensi | I | J | K | L |

Keterangan :

- Keuntungan privat (D) = A-(B+C)
- Transfer *input tradable* (J) = B – F
- Keuntungan sosial (H) = E – F – G
- Transfer *input non-tradable* (K) = C- G
- Rasio biaya sumber daya domestik(DRCR) = G/ (E – F)
- Koefisien proteksi efektif (EPC) = (A-B) / (E –F)
- Koefisien proteksi *output* nominal (NPCO) = A/E
- Transfer bersih (L) = D – H
- Transfer output (I) = A – E
- Rasio biaya privat (PCR) = C/ (A-B)

(domestik). Selanjutnya dilakukan analisis PAM. Adapun tahapan analisis dengan metode PAM ini adalah sebagai berikut : 1) penentuan Input dan Output Usahatani Jagung, 2) Alokasi Komponen Biaya *Tradable* (asing) dan *Non Tradable* (domestik), dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan total, 3) Penentuan Harga Bayangan.

Penentuan harga bayangan, menurut Gittinger (1986) harga bayangan adalah harga yang terjadi dalam suatu perekonomian apabila pasar berada dalam kondisi pasar persaingan sempurna dan dalam posisi keseimbangan. Penentuan harga bayangan input (benih dan pupuk) maupun *output* (jagung pipilan) untuk komoditas ekspor atau berpotensi ekspor digunakan harga perbatasan yaitu harga FOB (*Free On Board*), sedangkan untuk harga bayangan *input* ataupun *output* untuk komoditas impor digunakan harga perbatasan yaitu harga CIF (*Cost Insurance Freight*),

selanjutnya dikonversikan dengan nilai tukar dan dilakukan penambahan biaya tataniaga, yaitu biaya transportasi dan bongkar muat hingga sampai ke petani. Penentuan harga bayangan lahan, perhitungan harga bayangan untuk lahan mengacu pada Gittinger (1986) dimana harga yang digunakan sesuai dengan biaya sewa lahan per musim per hektar di lokasi tersebut. Harga bayangan tenaga kerja dalam penelitian ini mengacu pada Aldila *et al.* (2016) dimana harga bayangan tenaga kerja diperoleh dari perkalian upah aktual dengan persentase penduduk yang bekerja. Terdapat dua pendekatan untuk mengalokasikan biaya input asing (*tradable*) dan domestik (*non tradable*) yaitu dengan metode pendekatan langsung (*direct approach*) dan pendekatan total (*total approach*) (Monke & Person 1989). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan total. Metode Penentuan Harga Bayangan Menurut Gittinger (1986), harga

bayangan merupakan harga yang terjadi dalam perekonomian pada keadaan pasar persaingan sempurna dan kondisi keseimbangan. Pada penelitian ini harga bayangan untuk komoditas yang selama ini diimpor menggunakan pendekatan harga CIF (*Cost Insurance Freight*) dan untuk komoditas yang selama ini diekspor menggunakan pendekatan harga FOB (*Free on Board*).

PEMBAHASAN

Keuntungan Finansial dan Ekonomi Usahatani Jagung

Indikator keuntungan finansial usahatani jagung dapat dilihat dari nilai keuntungan privatnya, yang didasarkan pada harga aktualnya atau harga yang diterima petani. Keuntungan privat usahatani jagung mengukur tingkat keuntungan berdasarkan harga input dan output aktualnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan penerimaan dari kegiatan usahatani jagung yang paling tinggi, diperoleh dari Jawa Barat, yaitu sebesar Rp 18.6 juta/ha. Secara umum penerimaan privat usahatani jagung di Provinsi Jawa Barat relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan aktual usahatani di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan (Tabel 2).

Rata-rata penerimaan aktual usahatani jagung di wilayah –wilayah penelitian sebesar 14 juta/ha. Dikaji dari segi keuntungan privat usahatani yang dilakukan, usahatani di Jawa Timur memiliki keuntungan yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya, dan dari R/C-nya usahatani di Jawa Timur juga lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi

lainnya. Hal tersebut mengindikasikan, bahwa kegiatan usahatani jagung di Jawa Timur sudah mampu memberikan keuntungan yang cukup tinggi pada tingkat harga aktual per musim tanam per hektarnya. Secara keseluruhan keuntungan privat usahatani pada keempat provinsi bernilai positif, dimana kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya campur tangan pemerintah pada usahatani jagung, mampu memberikan insentif positif terhadap keuntungan usahatani jagung pada daerah-daerah tersebut.

Keuntungan yang diperoleh petani pada masing –masing wilayah memiliki nilai yang berbeda, hal tersebut dikarenakan harga jual jagung pipilan kering di setiap daerah yang berbeda. Disamping itu jumlah produksi jagung yang berbeda, hal tersebut yang menyebabkan tingkat penerimaan dan keuntungan petani pada masing – masing daerah berbeda. Tingkat pengeluaran biaya produksi untuk input juga berbeda, pada masing – masing daerah. Jawa Barat memiliki tingkat penerimaan yang paling tinggi, namun disisi lain biaya input yang dikeluarkan petani untuk kegiatan produksi juga paling besar dibandingkan provinsi lainnya. Sehingga dari segi keuntungan Jawa Barat tidak memperoleh keuntungan tertinggi dibandingkan provinsi Jawa Timur.

Keuntungan sosial merupakan keuntungan berdasarkan harga sosial, dimana harga sosial atau harga bayangan itu adalah harga sesungguhnya pada pasar persaingan sempurna, dan harga tersebut tidak mendapat kebijakan pemerintah maupun distorsi pasar. Harga sosial ini mencerminkan harga yang

Tabel 2 Analisis keuntungan privat dan sosial usahatani jagung di wilayah sentra produksi, 2017

| Provinsi | Penerimaan (Rp/ha) | Biaya (Rp/ha) | | | Keuntungan (Rp/ha) | R/C |
|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------|-----------------------|------|
| | | <i>Tradable</i> | <i>Non-Tradable</i> | Total | | |
| Jawa Timur | | | | | | |
| Privat | 18.579 | 2.159 | 9.315 | 1.474 | 7.104 | 1,62 |
| Sosial | 14.638 | 2.966 | 10.525 | 13.492 | 1.145 | 1,08 |
| Jawa Tengah | | | | | | |
| Privat | 9.419 | 1.530 | 6.158 | 7.688 | 1.731 | 1,23 |
| Sosial | 9.131 | 2.069 | 6.945 | 9.015 | 116 | 1,23 |
| Jawa Barat | | | | | | |
| Privat | 18.626 | 2.160 | 9.490 | 11.651 | 6.974 | 1,60 |
| Sosial | 13.870 | 2.739 | 10.703 | 13.442 | 428 | 1,03 |
| Sulawesi Selatan | | | | | | |
| Privat | 10.519 | 2.138 | 6.487 | 8.626 | 1.893 | 1,22 |
| Sosial | 13.547 | 2.671 | 7.456 | 10.127 | 3.419 | 1,34 |

sesungguhnya dari input yang digunakan dalam kegiatan usahatani dan harga output yang sesungguhnya. Kebijakan pemerintah pada usahatani jagung, dalam hal ini diantaranya subsidi pupuk, subsidi bunga kredit dan kebijakan tarif impor jagung sebesar 5 persen. Dalam perhitungan sosial ini, semua kebijakan- kebijakan tersebut dihilangkan dari komponen harga.

Keuntungan secara ekonomi dapat dilihat dari nilai keuntungan sosial usahatani jagung, dimana dalam hal ini Sulawesi Selatan memperoleh keuntungan sosial paling tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, yaitu sebesar 3.4 juta/ha, Selain itu nilai R/C-nya di Sulawesi Selatan juga paling tinggi pada kondisi biaya sosial, dibandingkan wilayah lainnya

(Tabel 2). Keuntungan rata – rata sosial pada keempat wilayah tersebut sebesar 1.29 juta/ ha, dengan R/C rata – ratanya sebesar 1.17.

Berdasarkan analisis yang dilakukan provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan memperoleh keuntungan sosial positif. Adanya keuntungan sosial yang positif mengindikasikan suatu usahatani dapat bertahan, tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Namun, dalam kondisi sosial atau tanpa adanya intervensi pemerintah, rata-rata keuntungan usahatani jagung lebih rendah dibandingkan dengan kondisi aktualnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dengan adanya intervensi pemerintah mampu meningkatkan keuntungan usahatani jagung di Indonesia, karena dengan adanya kebijakan pemerintah petani dapat membeli input – input *tradable*

usahatani lebih murah dari harga seharusnya (harga dunia).

Peningkatan produksi dan produktivitas usahatani jagung dapat dilakukan dengan penggunaan sarana produksi yang lebih efisien, penggunaan benih yang berkualitas, dan peningkatan areal tanam jagung (ekstensifikasi) khususnya untuk daerah – daerah luar Pulau Jawa yang masih memiliki potensi yang sangat besar untuk perluasan areal tanam jagung. Dengan adanya peningkatan produktivitas usahatani jagung hal tersebut tentunya akan berdampak signifikan dengan penerimaan dan keuntungan usahatani jagung.

Adanya perbedaan antara keuntungan privat dan sosial menunjukkan adanya divergensi. Identitas penyimpangan atau divergensi merupakan selisih antara harga privat suatu komoditas dengan harga sosialnya. Olagunju (2015) menyatakan adanya perbedaan atau divergensi keuntungan merupakan transfer bersih (*net transfer*) yang mengukur distorsi yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah atau kegagalan pasar. Pearson *et al.* (2005) menyatakan salah satu penyebab terjadinya divergensi antara nilai finansial dan ekonomi adalah karena adanya kegagalan pasar.

Pada penelitian Olagunju (2015) nilai transfer outputnya negatif, dimana artinya telah terjadi kegagalan pasar, namun jika input *tradable* yang bernilai negatif menunjukkan bahwa pemerintah mendukung (mensupport) input *tradable*, seperti pemberian subsidi untuk benih, BBM, herbisida. Berdasarkan perhitungan nilai divergensi yang dilakukan antara rata – rata keuntungan sosial dan privat

usahatani jagung ini sebesar Rp 3.1 juta/ha.

Keunggulan Kompetitif

Indikator yang digunakan dalam menentukan daya saing usahatani jagung dalam penelitian ini menggunakan pendekatan keunggulan kompetitif dan komparatif. Keunggulan kompetitif diukur dengan menggunakan nilai *Private Cost Ratio* (PCR). Dalam hal ini keunggulan kompetitif menunjukkan sejauh mana usahatani jagung yang dilakukan tersebut mampu membiayai faktor domestiknya pada harga aktual atau harga yang berlaku di pasar. Harga yang berlaku untuk mengukur keunggulan kompetitif jagung merupakan harga yang diterima petani di pasar, dimana harga – harga input yang digunakan tersebut sudah mendapatkan intervensi positif (subsidi) dari pemerintah dan petani memperoleh subsidi bunga kredit. Usahatani jagung dikatakan memiliki keunggulan secara kompetitif jika nilai PCR usahatani yang diperoleh bernilai kurang dari 1. Salvatore (2013) menyatakan suatu negara yang mampu memproduksi suatu komoditas dalam jumlah banyak dan dengan biaya yang murah, maka negara tersebut dikatakan memiliki keunggulan kompetitif.

Berdasarkan hasil analisis PAM pada Tabel 3, usahatani jagung pada keempat wilayah, memiliki keunggulan secara kompetitif, dengan nilai yang bervariasi. Dengan nilai rata – rata PCR atau keunggulan kompetitif pada keempat wilayah sebesar 0.67. Nilai PCR 0.67 menunjukkan bahwa rata – rata pada keempat wilayah produksi, untuk mendapatkan nilai tambah *output*

Tabel 3 Indikator Daya saing Jagung pada Wilayah Sentra Produksi, 2017

| Lokasi | PCR | DRCR |
|------------------|------|------|
| Jawa Timur | 0.56 | 0.90 |
| Jawa Tengah | 0.77 | 0.98 |
| Jawa Barat | 0.57 | 0.96 |
| Sulawesi Selatan | 0.77 | 0.68 |
| Rata-rata | 0.67 | 0.88 |

jagung sebesar 1 satuan (USD) diperlukan tambahan biaya faktor domestik sebesar 0.67. Hal tersebut menunjukkan bahwa usahatani jagung pada keempat wilayah sentra memiliki keunggulan kompetitif. Provinsi Jawa Timur memiliki nilai PCR yang paling kecil (paling berdayasaing) dibandingkan provinsi lainnya (Tabel 3). Nilai PCR di Jawa Timur sebesar 0.56, dimana artinya untuk mendapatkan nilai tambah jagung (*output*) sebesar 1 satuan pada harga privat, diperlukan tambahan biaya faktor domestik yang kurang dari satu satuan yaitu sebesar 0.56 dan hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki keunggulan secara kompetitif. Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, tambahan biaya faktor domestik sebesar 0.77. Wilayah Jawa Barat juga memiliki keunggulan secara kompetitif, dengan nilai PCR 0.57, artinya tambahan biaya faktor domestik yang diperlukan untuk mendapat nilai tambah output sebesar satu satuan pada harga privat, kurang dari satu satuan yaitu 0.57.

Hal ini juga menunjukkan bahwa Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki keunggulan secara kompetitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan usahatani jagung di wilayah Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Hal tersebut dikarenakan faktor domestik

yang dibutuhkan untuk menambah satu satuan output di Jawa Timur dan Jawa Barat lebih sedikit (0.56 dan 0.57), jika dibandingkan dengan wilayah Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan (0.77).

Keunggulan Komparatif

Indikator untuk pengukuran keunggulan komparatif adalah nilai *Domestik Resource Cost Ratio* (DRCR). Suatu komoditas dikatakan memiliki keunggulan secara komparatif jika usahatani yang dilakukan efisien dalam penggunaan sumberdaya domestik, dan nilai DRCR-nya kurang dari 1.

Berdasarkan hasil analisis PAM pada Tabel 2 rata-rata usahatani jagung yang diusahakan pada beberapa sentra produksi memiliki keunggulan komparatif sebesar 0,82, dimana artinya jika jagung diproduksi di dalam negeri khususnya pada keempat wilayah produksi, maka rata-rata membutuhkan biaya sebesar 0.82 satuan, sehingga terjadi penghematan biaya sebesar 0.18 satuan. Artinya biaya yang diperlukan untuk memproduksi jagung di dalam negeri masih lebih murah dibandingkan dengan negara eksportir. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani jagung di Indonesia sudah mampu berdayasaing dengan jagung impor.

Berdasarkan hasil analisis PAM pada Tabel 3, nilai DRCR paling rendah

atau keunggulan komparatif yang paling tinggi dimiliki oleh Sulawesi Selatan, dengan nilai DRCR 0.66. Dimana hal ini menunjukkan bahwa jika jagung diproduksi di Sulawesi Selatan, maka akan membutuhkan biaya sebesar 0.66 satuan, sehingga terjadi penghematan biaya sebesar 0.34 satuan, yang artinya biaya yang diperlukan untuk memproduksi jagung di dalam negeri khususnya di Sulawesi Selatan lebih murah dibandingkan jika mengimpor dari negara lain. Dan nilai DRCR yang rendah menunjukkan bahwa usahatani jagung di Sulawesi Selatan sudah efisien dalam penggunaan sumberdaya domestik.

Analisis Daya saing Keunggulan Kompetitif dan Komparatif

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan metode *Policy Analysis Matrix* (PAM), diperoleh hasil bahwa keempat wilayah sentra produksi jagung sudah unggul secara kompetitif dan Jawa Timur memiliki keunggulan kompetitif tertinggi, dibandingkan tiga sentra lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur yang juga sebagai sentra produksi jagung, mampu berdaya saing dalam kondisi aktual. Kondisi dimana adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah, seperti subsidi pupuk dan kredit. Namun keunggulan komparatif Jawa Timur rendah. Artinya jika tidak adanya intervensi positif dari pemerintah, maka Jawa Timur memiliki daya saing yang rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian Ogbe *et al.* (2011) yang menyatakan keuntungan privat yang positif pada jagung dan padi dataran tinggi, padi irigasi di Nigeria memiliki keunggulan

kompetitif dikarenakan teknologi yang berlaku, harga *input – output* dan adanya kebijakan pemerintah yang berlaku.

Sulawesi Selatan yang memiliki nilai PCR atau keunggulan secara kompetitifnya masih lebih rendah daripada Jawa Timur dan provinsi lainnya. Namun jika dikaji berdasarkan nilai DRCR atau efisiensi penggunaan sumberdaya domestik, Sulawesi Selatan memiliki keunggulan kompetitif yang paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Kondisi tersebut menjadikan Sulawesi Selatan memiliki potensi pengembangan usahatani jagung kedepannya. Hal tersebut didukung tidak hanya dari aspek keunggulan komparatif yang tinggi dan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya domestik saja, tetapi dari aspek ketersediaan lahan di Sulawesi Selatan yang belum dimanfaatkan.

Berdasarkan data BPS Sulsel (2017) luasan lahan bukan sawah yang belum dimanfaatkan mencapai 105 ha. Ketersediaan lahan yang didukung oleh tingginya *demand* jagung untuk industri pakan, merupakan potensi pendukung pengembangan usahatani jagung ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sendiri terdapat pabrik pakan dengan kapasitas produksi diatas 10 000 ton (Kementan 2017).

Dampak Kebijakan pemerintah terhadap Daya saing Jagung

Dampak kebijakan pada usahatani jagung dibedakan menjadi tiga bagian yaitu dampak kebijakan input, dampak kebijakan output, dan dampak kebijakan input-output. Indikator yang digunakan untuk

melihat dampak kebijakan pemerintah terkait input dapat dilihat melalui indikator *Nominal Protection Coeficient Input* (NPCI). Dampak kebijakan usahatani jagung terhadap *output* adalah nilai *transfer output* dan *Nominal Protection Coeficient Output* (NPCO). Serta untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap *input* dan *output* secara simultan dapat dilihat dari indikator nilai *Effective Protection Coeficient* (EPC).

Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Input

Disamping adanya kebijakan terhadap *output*, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait input usahatani, seperti adanya kebijakan subsidi pupuk untuk tanaman pangan, dan bantuan kredit untuk petani pangan. Adanya bantuan – bantuan pemerintah tersebut ternyata mampu memberikan insentif positif kepada petani. Adanya kebijakan pemerintah ini memberikan insentif bagi petani, sehingga membuat petani jagung dapat membayar input *tradable* lebih murah dari seharusnya.

Untuk dapat mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap input pada usahatani jagung dapat dilihat dari tiga indikator, diantaranya Transfer Input, Transfer Faktor, dan *Nominal Protection Coeficient Input* (NPCI). Transfer input menunjukkan ada atau

tidaknya kebijakan pemerintah pada input *tradable*. Transfer faktor menunjukkan ada atau tidaknya kebijakan pemerintah terkait pada input *non-tradable*. Dan nilai NPCI menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap input *tradable*. Hasil perhitungan dampak kebijakan pemerintah terhadap input dijabarkan pada Tabel 4.

Berdasarkan analisis yang dilakukan nilai transfer input pada keempat wilayah bernilai negatif. Nilai transfer input negatif menunjukkan bahwa harga sosial input *tradable* lebih tinggi daripada harga privatnya. Dengan kata lain petani pada keempat wilayah dapat membeli input *tradable* lebih murah dari yang seharusnya. Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah terhadap input yang ditetapkan di Indonesia, seperti subsidi pupuk, subsidi modal pinjaman sudah memberikan insentif positif kepada petani jagung di wilayah tersebut. Kebijakan pemerintah terhadap subsidi pupuk menunjukkan adanya dampak positif yaitu petani membayar harga pupuk urea, ZA, KCl, SP36 dan NPK lebih murah dibandingkan harga dunia.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa transfer input *tradable* pada keempat wilayah bernilai negative. Dimana artinya harga input yang diterima petani lebih murah dari harga yang seharusnya

Tabel 4 Indikator dampak kebijakan pemerintah terhadap input usahatani jagung di wilayah sentra produksi di Indonesia (2017)

| Lokasi | Transfer Input <i>Tradable</i> (Rp/ha) | Transfer Faktor <i>Non-Tradable</i> (Rp/ha) | NPCI |
|------------------|---|--|------|
| Jawa Timur | -807 137 | -1 210 420 | 0.72 |
| Jawa Tengah | -538 996 | -789 064 | 0.74 |
| Jawa Barat | -578 442 | -1 212 696 | 0.79 |
| Sulawesi Selatan | -532 491 | -969 152 | 0.80 |

(harga dunia). Dalam hal ini petani di Jawa Timur memperoleh penghematan biaya input sebesar Rp807.137/ ha, dengan adanya intervensi positif dari pemerintah, petani di Jawa Tengah dapat menghemat biaya pupuk sebesar Rp538 996/ha. Petani di Jawa Barat juga dapat

menghemat biaya input sebesar Rp 578.442/ ha. Dan petani di Sulawesi Selatan dapat menghemat biaya input paling rendah dibandingkan ketiga provinsi lainnya, biaya yang dihemat hanya sebesar Rp 532.491/ha.

Berdasarkan analisis transfer faktor untuk intervensi terhadap input *non-tradable*, penghematan biaya tertinggi diperoleh oleh petani di Jawa Timur dan Jawa Barat. Dimana petani pada kedua daerah tersebut untuk komponen input *non-tradable* mampu dihemat hingga 1.2 juta per ha. Tingkat proteksi pemerintah terhadap input *tradable* pada keempat lokasi sudah memberikan dampak positif. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan indikator NPCI pada beberapa lokasi produksi jagung yang bernilai kurang dari 1 (Tabel 4). Nilai NPCI < 1 artinya tingkat proteksi pemerintah terhadap input *tradable* tinggi, sehingga petani membayar harga input *tradable* lebih rendah dari harga seharusnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan petani di Jawa Timur dapat membeli input 28 persen lebih murah dibandingkan harga sesungguhnya. Petani di Jawa Tengah dan Jawa Barat juga dapat membeli input 26 persen dan 21 persen lebih murah dari harga seharusnya. Sedangkan di wilayah Sulawesi Selatan petani dapat membeli input hanya lebih rendah 20 persen

daripada harga yang seharusnya (harga dunia).

Hal ini menunjukkan adanya bantuan berupa subsidi dari pemerintah untuk *input* usahatani jagung menjadikan usahatani jagung berdayasaing. Rahman *et al.* (2016) juga menyatakan usahatani jagung di Bangladesh dapat berdayasaing secara kompetitif, karena faktor-faktor inputnya disubsidi oleh pemerintah. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Kone *et al.* (2015), dimana produk sereal memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi di Maharashtra dan Haryana, dibandingkan dengan kapas, dikarenakan kebijakan pemerintah yang memberikan harga yang baik dan subsidi input yang tinggi untuk usahatani tanaman pangan.

Nilai transfer faktor menunjukkan angka negatif pada keempat lokasi penelitian, dimana hal ini mengindikasikan bahwa petani membayar input *non-tradable* lebih murah dibandingkan harga dunia (harga sosial).

Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Output

Kebijakan pemerintah terkait dengan *output* jagung memberikan dampak positif terhadap petani jagung, di Jawa Timur, dan Jawa Barat, namun di Sulawesi Selatan kebijakan pemerintah memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usahatani jagung (Tabel 5).

Kondisi ini menunjukkan bahwa harga jual jagung yang diterima petani di daerah Jawa Timur, Jawa tengah dan Jawa Barat lebih tinggi daripada harga sosialnya. Hal ini menyebabkan petani dapat menerima pendapatan lebih

Tabel 5 Indikator dampak kebijakan pemerintah terhadap output usahatani jagung di wilayah sentra produksi di Indonesia (2017)

| Lokasi | Transfer Output | NPCO |
|------------------|-----------------|------|
| Jawa Timur | 3 941 639 | 1.27 |
| Jawa Tengah | 288 386 | 1.03 |
| Jawa Barat | 4 755 241 | 1.34 |
| Sulawesi Selatan | -3 028 302 | 0.78 |

tinggi dari seharusnya. Namun kondisi berbeda terjadi di Sulawesi Selatan, dimana harga aktual jagung lebih rendah daripada harga sosialnya. Kondisi ini menunjukkan, dengan adanya kebijakan penetapan tarif impor jagung dianggap mampu mengendalikan aliran masuk jagung impor, dan penetapan Harga

Pembelian Produsen (HPP) jagung menyebabkan harga jagung di dalam negeri dapat dikendalikan. Mekanisme impor jagung sudah diatur ketat melalui kebijakan penetapan tarif impor jagung dan penentuan harga pembelian produsen (HPP). Kondisi ini ditunjukkan dengan nilai NPCO pada beberapa lokasi produksi jagung yang bernilai lebih dari 1 (Tabel 5).

Namun kondisi berbeda terjadi di Sulawesi Selatan, dimana nilai NPCO atau tingkat proteksi pemerintah terhadap output di daerah tersebut masih rendah, dimana nilai NPCO < 1. Hal ini menyebabkan harga output yang diterima petani lebih rendah dari harga sebenarnya. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian Suryana & Agustian (2014) dimana di provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa provinsi sentra produksi lainnya nilai NPCO < 1, hal ini menunjukkan pemerintah tidak atau belum memberikan kebijakan yang bersifat protektif terhadap sistem usahatani jagung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa walaupun

usahatani jagung di Sulawesi Selatan berdayasaing, namun pada wilayah tersebut kebijakan pemerintah belum bersifat protektif terhadap *output* jagung. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung usahatani jagung di wilayah Sulawesi Selatan masih dapat berdayasaing tanpa adanya proteksi output dari pemerintah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terkait kebijakan pemerintah terhadap output, transfer output di wilayah Sulawesi Selatan bernilai negatif, dimana artinya kegiatan usahatani jagung di wilayah tersebut mengalami kerugian sebesar 3.028 juta/ha (Tabel 5). Kerugian tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah terkait output dengan penetapan HPP belum mampu membantu petani untuk mendapatkan harga minimal yang sesuai dengan ketetapan HPP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nilai NPCO sebesar 0.78 menunjukkan karena tidak berpengaruhnya kebijakan pemerintah menyebabkan, nilai total output 22 persen lebih rendah dari yang seharusnya.

Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Input - Output

Dampak kebijakan pemerintah terhadap input dan output secara simultan, dapat dilihat dari transfer bersih dan *Effective Protection Coefficient* (EPC). Dimana nilai transfer

bersih menunjukkan dampak kebijakan pemerintah terhadap input dan output secara bersama-sama terhadap usahatani jagung. Nilai EPC menggambarkan sejauh mana kebijakan pemerintah pada *input* dan *output* bersifat melindungi atau menghambat produksi dalam negeri. Berdasarkan analisis PAM yang dilakukan, kebijakan pemerintah terhadap input dan output secara simultan dapat memberikan insentif positif bagi petani di ketiga lokasi penelitian. Dimana hal tersebut tercermin dari nilai transfer bersih yang positif. Hal tersebut menunjukkan adanya tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah pada input dan output. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 6, wilayah pulau Jawa memperoleh nilai transfer bersih positif, namun berbeda halnya dengan wilayah Sulawesi Selatan yang nilai transfer bersihnya bernilai negatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah pada input dan output menyebabkan petani di Sulawesi Selatan mengalami kerugian, karena keuntungan yang diterima lebih kecil daripada keuntungan yang seharusnya diterima petani.

Tingkat proteksi pemerintah terhadap produksi jagung pada ketiga wilayah yang bernilai positif, dimana hal tersebut dicerminkan pada nilai

EPC lebih besar dari satu. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan wilayah di daerah Jawa tingkat proteksi pemerintah terhadap proteksi dalam negeri tinggi. Dimana dalam hal ini kebijakan pemerintah memberikan dukungan berupa insentif dalam pengembangan komoditas, dan kebijakan pemerintah melindungi produsen domestik secara efektif. Namun di Provinsi Sulawesi Selatan, kebijakan pemerintah terhadap input dan output belum memberikan insentif kepada petani setempat. Kondisi ini dimungkinkan dikarenakan kebijakan pemerintah terkait output jagung belum

merata. Oleh karena itu berdasarkan analisis yang dilakukan usahatani jagung di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat berdayasaing, karena adanya intervensi atau bantuan berupa subsidi dari pemerintah. Namun, untuk wilayah Sulawesi Selatan usahatani jagung mampu berdayasaing walaupun tanpa adanya intervensi dari pemerintah, hal tersebut dikarenakan tingkat proteksi pemerintah terhadap usahatani jagung di daerah tersebut masih rendah.

Kondisi ini sangat berbeda dengan hasil penelitian Suryana & Agustian (2014) yang dimana kegiatan usahatani jagung di beberapa sentra produksi di Indonesia yang nilai

Tabel 6 Indikator dampak kebijakan pemerintah terhadap input-output usahatani jagung di wilayah sentra produksi di indonesia (2017)

| Lokasi | Transfer Bersih (Rp/Ha) | EPC |
|------------------|----------------------------|------|
| Jawa Timur | 5 959 196 | 1.41 |
| Jawa Tengah | 1 616 446 | 1.12 |
| Jawa Barat | 6 546 379 | 1.48 |
| Sulawesi Selatan | -1 526 659 | 0.77 |
| Rata -rata | 3 148 840 | 1.19 |

koefisien proteksi efektifnya masih dibawah 1 ($EPC < 1$). Kondisi tersebut dimungkinkan pada tahun 2014 kebijakan pemerintah belum secara intensif memberikan insentif positif untuk petani jagung. Namun berdasarkan hasil analisis PAM tahun 2017 pada penelitian ini, kebijakan pemerintah sudah memberikan proteksi kepada produksi jagung dalam negeri. Kondisi ini didukung dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen, hal tersebut dilakukan agar saat produksi melimpah (panen raya) harga jagung dalam negeri tidak anjlok.

Penetapan kebijakan tarif impor jagung sebesar 5 persen, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017. Hal tersebut juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk melindungi produksi jagung nasional dari gempuran jagung impor yang dimana harga dunianya cenderung lebih murah. Selain itu sejak tahun 2014 pemerintah mulai meningkatkan produksi dengan program upaya khusus (UPSUS) pajale (padi, jagung, dan kedelai).

Semua kebijakan dan program-program yang dilakukan pemerintah dilakukan untuk meningkatkan produksi jagung nasional dan meningkatkan daya saing jagung dalam negeri. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wanto (2017) dimana kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing jagung di Indonesia, jadi dengan adanya kebijakan pemerintah

makan daya saing jagung Indonesia akan semakin meningkat.

Alternatif Kebijakan Peningkatan Daya saing Usahatani Jagung

Pemerintah semenjak tahun 2014 hingga 2019 telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan nasional, salah satunya jagung, program pemerintah tersebut salah satunya adalah upsus pajale (padi, jagung, kedelai). Dengan adanya program ini diharapkan Indonesia mampu memenuhi pangannya secara mandiri (*independent*). Seperti halnya jagung, untuk jagung sendiri pemerintah telah mencanangkan program perluasan lahan jagung mencapai 5 juta hektar, dimana sasarnya upsus sendiri untuk jagung sebesar 33,08 juta ton (Dirjen Tanaman Pangan 2018). Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur yang belum termanfaatkan, pemanfaatan lahan ladang, lahan di bawah tegakan pohon, hingga pemanfaatan lahan pekarangan.

Disamping perluasan lahan peningkatan produktivitas jagung juga dilakukan dengan penggunaan benih – benih unggul, dimana dengan penggunaan benih hibrida, produktivitas jagung bisa mencapai 8 hingga 10 ton per hektar. Disamping itu juga pemerintah diharapkan membantu petani tidak hanya pada bagian hulu tetapi hingga ke hilir, dimana disediakan akses untuk memasarkan hasil produksi jagung yang dihasilkan petani. Permasalahan yang selama ini terjadi adalah, dikarenakan produksi jagung bersifat musiman, hal tersebut membuat harga jagung pada saat panen raya anjlok, dan

tentu saja hal itu akan merugikan petani, dan disisi lain jagung merupakan komoditas pertanian yang tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang.

Oleh karena itu pemerintah dan perusahaan pakan, diharapkan dapat bekerjasama membantu petani untuk mengakses pasar dan membeli jagung petani dengan harga yang layak saat terjadinya panen raya. Suryana dan Agustian (2012) menyatakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, dapat dilakukan dengan penerapan kebijakan operasional diantaranya : percepatan diseminasi dan penerapan teknologi budidaya spesifik lokal, fasilitas penyediaan benih unggul, pengaturan pengadaan dan pendistribusian pupuk, pengaturan penyediaan air, penanganan pasca panen guna menanggulangi kehilangan saat panen, pendampingan kepada petani secara intensif, penyediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan aksesibilitas sentra – sentra produksi terhadap pasar input dan output, pemberian insentif kepada petani, pengembangan kelembagaan petani, pengaktifan program – program penelitian yang bersifat terapan, pemberian fasilitas kredit untuk permodalan, dan pengkonsolidasian manajemen pengelolaan sistem usahatani dalam kelompok tani secara terpadu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan,

usahatani jagung di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan menguntungkan secara finansial, namun secara ekonomi berdasarkan harga sosial, pemerintah tidak memberikan intervensi apapun keuntungan yang diperoleh petani pada keempat wilayah masih rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa usahatani jagung pada keempat wilayah produksi mampu memperoleh keuntungan finansial karena adanya intervensi positif dari pemerintah. Sulawesi Selatan memiliki potensi sebagai sentra pengembangan usahatani jagung, kondisi tersebut didukung oleh keunggulan komparatif yang tinggi dan masih tersedianya lahan untuk usahatani jagung di Sulawesi Selatan. Keunggulan komparatif mengindikasikan bahwa kegiatan usahatani yang dilakukan sudah efisien dalam penggunaan sumberdaya domestik.

Hasil analisis terkait kebijakan pemerintah yang dilakukan, menunjukkan bahwa pemberian subsidi pupuk dan subsidi suku bunga kredit memberikan insentif positif kepada petani. Kebijakan tersebut sudah mendukung produksi jagung di Indonesia, adanya intervensi positif pemerintah menyebabkan petani dapat membeli input *tradable* dengan harga yang lebih rendah dari harga sesungguhnya. Namun untuk kebijakan *input* belum merata, dimana proteksi output jagung di Sulawesi Selatan masih rendah. Oleh karena itu dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa pada keempat wilayah produksi, usahatani jagung mampu berdayasaing karena adanya intervensi positif untuk input dari pemerintah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan pada penelitian ini, diantaranya: perlu dilakukannya ekspansi areal tanam jagung ke luar Pulau Jawa. Pengembangan ke Sulawesi Selatan menjadi salah satu alternatifnya, mengingat dari hasil analisis yang dilakukan Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif yang paling tinggi. Ekspansi ke areal luar Pulau Jawa dipandang perlu dilakukan, mengingat lahan yang semakin terbatas di Pulau Jawa akibat adanya alihfungsi lahan dan adanya kompetisi dengan tanaman pangan maupun hortikultura lainnya. Selanjutnya peningkatan keunggulan komparatif usahatani jagung, dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas usahatani jagung, dengan penggunaan benih unggul, agar tercapainya potensi produktivitas nasional usahatani jagung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldila Haris Fathori, Anna Fariyanti, dan Netti Tinaprilla. 2017. Daya saing bawang merah di wilayah sentra produksi di Indonesia. *J Manajemen & Agribisnis*, 14 (1). Maret 2017. DOI: 10.17358/JMA.14.1.43.
- Asmarantaka Ratna Winandi. 2015. Kajian pengelolaan 12 komoditas pangan oleh Perum BULOG (jagung). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Agustian Andang. 2012. Pengaruh harga dan infrastruktur terhadap penawaran output, permintaan input dan daya saing usahatani jagung di Jawa Timur dan Jawa Barat. [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Indonesia, Data ekspor-impor (dinamis). Jakarta (ID): BPS. (https://www.bps.go.id/all_newtemplate.php). Akses 3 Maret 2018
- [BPS Sulsel] Badan Pusat Statistik. 2017. Sulawesi Selatan dalam angka. [publikasi]. Sulawesi Selatan (ID): BPS.
- [Dirjen Pangan] Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 2018. Evaluasi luas tanam pajale tahun 2017 dan strategi program tahun 2018. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- Kannapiran, Chinna A dan Euan M Fleming. Competitiveness and comparative advantage of tree crop smallholdings in Papua New Guinea. *Agricultural and Resource Economics*. ISSN 1442 1909. <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/12911/1/wp9910.pdf>. Akses : 19 Maret 2018.
- Gittinger J Price. 1986. *Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian*. Edisi ke-2. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2017. Tanpang ARAM II 2017. [Publikasi]. Akses: http://www.pertanian.go.id/ap_pages/mod/datatp. Akses 29 Maret 2018.
- Kone B, Lebailly, Berti F, Theriault V, Dembele M. 2015. Competitiveness and incentive

- production of cotton sector in Mali. *Research journal of Agriculture and Environmental Management*. 12 (4), pp 509-51.
- Monke A Eric dan Pearson E Scott. 1989. *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development*. London (GB): Cornell University Press.
- Nursan Muhammad. 2015. Efisiensi dan daya saing usahatani jagung pada lahan kering dan sawah di Kabupaten Sumbawa. [Tesis]. Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Olagunju, Funke Iyabo. 2015. Comparative advantage and competitiveness of cashew crop in Nigeria : the policy analysis matrix. *International Journal of Agriculture and Economic Development*, 3(1), 1-14.
- Ogbe AO, Saka JO, Okoruwa V. 2011. Competitiveness of Nigerian rice and maize production ecologies : A policy analysis approach. *J Tropical and Subtropical Agroecosystems*. 14 : 493 – 500.
- Pearson, Scott., Carl Gotsch, Sjaiful Bahri. 2005. *Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- [Pusdatin] Kementerian Pertanian. 2016. Outlook komoditas pertanian sub sector tanaman pangan (jagung). Jakarta (ID): Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (<http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/arsip-outlook/81-outlook-tanaman-pangan/432-outlook-jagung-2016>). Akses 23 September 2017.
- Rahman, Sanzidur., M Haque Kazal , Ismat Ara Begum, dan Muhammad Jahangir Alam. 2016. Competitiveness, Profitability, Input Demand and Output Supply of Maize Production in Bangladesh. *J Agriculture*, 6 (21). DOI : 10.3390/agriculture 6020021.
- Salvatore Dominic. 2013. *Internasional Economic 11th edition*. New Fordham University, New York.
- Suryana Achmad dan Agustian Andang. 2014. Analisis daya saing usahatani jagung di Indonesia. *J Analisis Kebijakan Pertanian*, 12 (2), Desember 2014:143-156.
- Wanto Hary Sastrya. 2017. Analisis daya saing jagung Indonesia di Perdagangan Internasional. Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti. ISBN: 978-602-50015-0-5.

